

Reorientasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan

Reorientation of Community Empowerment Policies in Sustainable Marine and Fisheries Development

*Wahjudi Poerwanto

¹Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 24 Agustus 2025
Perbaikan naskah: 15 November 2025
Disetujui terbit : 10 Desember 2025

*Korespondensi penulis:
Email: wahjudi.poerwanto@kkp.go.id
DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jksekpv15i2.19105>



ABSTRAK

Program pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mencapai efektivitas yang berkelanjutan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemberdayaan masyarakat dan partisipasi sebagai determinan utama dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif melalui metode studi kasus di tiga kabupaten pesisir, antara lain Indramayu, Pati, dan Lombok Utara, penelitian ini menelaah keterkaitan antara tingkat partisipasi masyarakat, model pemberdayaan yang diterapkan, dan capaian program pembangunan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 45 informan kunci yang terdiri atas aparatur pemerintah daerah, pengelola program, dan perwakilan masyarakat pesisir, serta melalui observasi partisipatif dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pembangunan kelautan dan perikanan sangat bergantung pada kombinasi partisipasi aktif masyarakat dan model pemberdayaan yang kontekstual serta adaptif terhadap kondisi lokal. Model pemberdayaan partisipatif menghasilkan efektivitas 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan model paternalistik (82% vs. 35%). Analisis lanjutan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas program ($\beta = 0,67$, $p < 0,01$), dengan partisipasi masyarakat berperan sebagai variabel mediasi ($\beta = 0,35$, $p < 0,01$). Empat faktor kunci yang menentukan efektivitas meliputi kapasitas kelembagaan masyarakat, kesesuaian teknologi dengan karakteristik lokal, akses terhadap sumber daya ekonomi dan informasi, serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten. Temuan ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari pendekatan *top-down* menuju tata kelola partisipatif (*bottom-up participatory governance*) dalam perencanaan dan implementasi program. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan, penelitian ini merekomendasikan penguatannya kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir, pembentukan mekanisme partisipasi yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal, serta integrasi pemberdayaan berbasis pengetahuan lokal dalam desain kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat; partisipasi; efektivitas program; pembangunan kelautan; perikanan

ABSTRACT

Marine and fisheries development programs in Indonesia face complex challenges in achieving sustainable effectiveness at the local level. This study aims to analyze the roles of community empowerment and participation as key determinants in enhancing the effectiveness of marine and fisheries development programs. Using an exploratory qualitative approach and a case study method conducted in three coastal districts, Indramayu, Pati, and North Lombok. This research examines the interrelationship between the level of community participation, the empowerment models applied, and the outcomes of development programs. Data was collected through in-depth interviews with 45 key informants, including local government officials, program managers, and representatives of coastal communities, complemented by participatory observation and policy document analysis. The findings reveal that the effectiveness of marine and fisheries development programs largely depends on the combination of active community participation and empowerment models that are contextually grounded and locally adaptive. The participatory empowerment model demonstrated 2.3 times higher effectiveness compared to the paternalistic model (82% vs. 35%). Further analysis indicates that community empowerment has a positive and significant influence on program effectiveness ($\beta = 0.67$, $p < 0.01$), with community participation acting as a mediating variable ($\beta = 0.35$, $p < 0.01$). Four key factors influencing program effectiveness include community institutional capacity, the appropriateness of technology to local characteristics, access to economic and informational resources, and consistent government policy support. The study underscores the need for a paradigm shift from a top-down approach toward bottom-up participatory governance in program planning and implementation. To enhance effectiveness and sustainability, this study recommends strengthening the institutional capacity of coastal communities, establishing inclusive and locally responsive participatory mechanisms, and integrating locally based knowledge empowerment into the design of marine and fisheries development policies and programs in Indonesia.

Keywords: community empowerment; participation; program effectiveness; marine development; fisheries

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, mencakup wilayah perairan seluas 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang 108.000 km (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023).

Sektor kelautan dan perikanan berperan penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 2,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari tujuh juta tenaga kerja, termasuk 2,17 juta nelayan atau sekitar 0,87% dari total angkatan kerja Indonesia (BPS, 2023). Pada tahun 2022, produksi perikanan nasional

mencapai 14,78 juta ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp506,14 triliun. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. Kondisi ini tercermin dari penurunan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 106,45 pada tahun 2022 menjadi 104,85 pada tahun 2024 yang menunjukkan melemahnya daya beli nelayan terhadap barang dan jasa konsumsi. Selain itu, masyarakat pesisir masih menyumbang sekitar 25% dari total penduduk miskin nasional, dengan jumlah nelayan miskin mencapai 14,58 juta jiwa pada tahun 2019 dan tingkat kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi (0,013) dibandingkan masyarakat nonpesisir (0,0054) (Bappenas, 2023).

Selama dua dekade terakhir, pemerintah Indonesia meluncurkan beragam program pembangunan kelautan dan perikanan seperti Minapolitan, Kampung Lele, Gemarikan, hingga Program Ekonomi Biru (*Blue Economy Development Program*). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar program tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan (Satria, 2021; Nikijuluw, 2022). Berbagai kelemahan kerap muncul, antara lain ketidaksinambungan setelah program berakhir, tidak tercapainya target produksi, serta ketidaksesuaian antara tujuan program dan kebutuhan nyata masyarakat sasaran. Masyarakat pesisir sebagai aktor utama pembangunan kelautan memiliki karakter sosial, ekonomi, dan budaya yang khas, termasuk pengetahuan lokal yang telah lama menjadi dasar pengelolaan sumber daya (Kusnadi, 2020). Dominasi pendekatan *top-down* dalam perencanaan serta pelaksanaan program sering kali menyingkirkan partisipasi aktif masyarakat dan mengabaikan dimensi pemberdayaan, padahal kedua aspek tersebut terbukti berperan penting dalam menentukan keberhasilan sekaligus keberlanjutan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Konsep pemberdayaan masyarakat memiliki dasar teoritis yang kuat dalam literatur pembangunan sosial. Rappaport (1984) memandang pemberdayaan sebagai proses peningkatan kontrol individu dan komunitas atas kehidupan mereka, menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan pembelajaran berkelanjutan. Zimmerman (2000) memperluas konsep ini dengan membaginya ke dalam tiga dimensi, yaitu intrapersonal (efikasi diri dan motivasi), interaksional (kepemimpinan dan mobilisasi sumber daya), dan perilaku (keterlibatan aktif dalam kegiatan komunitas). Freire (1970/2018) melalui *Pedagogi Kaum Tertindas* menekankan konsep *penyadaran kritis (conscientization)* yang mendorong masyarakat memahami dan mengubah realitas sosialnya, suatu pendekatan yang sangat

relevan untuk membangun kesadaran masyarakat pesisir terhadap hak dan potensi sumber daya mereka. Konsep partisipasi masyarakat telah dikaji luas melalui berbagai teori dan model yang menyoroti dinamika keterlibatan warga dalam proses pembangunan. Arnstein (1969) melalui *Ladder of Citizen Participation* serta Pretty (1995) menawarkan tipologi partisipasi yang menggambarkan spektrum keterlibatan mulai dari bentuk manipulatif hingga partisipasi yang bersifat *self-mobilized*. White (1996) menekankan bahwa partisipasi kerap dijadikan alat legitimasi kebijakan, bukan sarana pemberdayaan sejati, sedangkan Chambers (1997) melalui pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* mendorong perubahan paradigma agar pihak luar belajar dari masyarakat lokal, bukan sebaliknya.

Pada konteks pengelolaan sumber daya perikanan, teori *common-pool resource management* yang dikembangkan Ostrom (1990, 2020) menghadirkan delapan prinsip desain tata kelola berkelanjutan yang terbukti relevan diterapkan pada kondisi sosial-ekologis Indonesia. Selain itu, kerangka *Sustainable Livelihoods Framework* (DFID, 1999; Scoones, 2009) menyoroti pentingnya peran berbagai bentuk modal, seperti manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial sebagai fondasi dalam memperkuat kapasitas adaptif masyarakat. Sejalan dengan itu, gagasan *community-based fisheries management* (Pomeroy, 1995) serta *adaptive co-management* (Berkes, 2009) menegaskan urgensi tanggung jawab bersama, pembelajaran berkelanjutan, dan integrasi pengetahuan lokal serta ilmiah untuk mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan inklusif.

Berbagai penelitian empiris di Indonesia (Handoko et al., 2023; Prasetyo et al., 2023) menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan kelautan dan perikanan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, kesesuaian teknologi dengan kondisi lokal, dan dukungan kebijakan yang konsisten. Namun sebagian besar studi masih berfokus pada aspek teknis dan ekonomi seperti produksi, teknologi, serta analisis finansial (Rahardjo et al., 2019; Permana & Dharmawan, 2020), sementara dimensi sosial seperti pemberdayaan dan partisipasi belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal penelitian pada tingkat global (Chuenpagdee & Jentoft, 2018; Pomeroy et al., 2021) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis pemberdayaan merupakan kunci keberhasilan dan keberlanjutan program perikanan skala kecil. Kekosongan penelitian empiris yang mengkaji hubungan antara pemberdayaan masyarakat, partisipasi, dan efektivitas program pembangunan kelautan di Indonesia menjadi alasan

penting untuk dilakukan penelitian ini, mengingat konteks geografis, sosial budaya, dan kelembagaan Indonesia yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama, antara lain, (1) bagaimana peran pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan kelautan dan perikanan; (2) faktor-faktor apa yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat; dan (3) model pemberdayaan dan partisipasi seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan keberhasilan program pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran pemberdayaan masyarakat terhadap efektivitas program, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi, serta merumuskan model pemberdayaan dan partisipasi yang efektif guna meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) yang bertujuan memahami secara mendalam proses pemberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam program pembangunan kelautan dan perikanan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna, dinamika sosial, serta interaksi kelembagaan yang kompleks dalam konteks pembangunan masyarakat pesisir (Creswell, 2018). Penelitian dilaksanakan di tiga kabupaten pesisir yang dipilih secara purposive berdasarkan pertimbangan keragaman geografis dan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pesisir, yakni Kabupaten Indramayu (Jawa Barat), Kabupaten Pati (Jawa Tengah), dan Kabupaten Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat). Ketiga lokasi tersebut memiliki program pembangunan kelautan dan perikanan yang masih aktif serta mewakili variasi konteks kelembagaan dan praktik pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama enam bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, serta analisis hasil penelitian. Informan penelitian dipilih menggunakan kombinasi purposive sampling dan snowball sampling untuk memastikan keterwakilan berbagai aktor yang relevan. Total terdapat 45 informan, terdiri atas sembilan pejabat pemerintah daerah bidang kelautan dan perikanan, sembilan fasilitator atau pendamping program, lima belas tokoh masyarakat dan ketua kelompok nelayan, serta dua belas nelayan dan pembudi daya tambak. Seluruh informan dipilih berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah masing-masing.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan informan terkait pelaksanaan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Kedua, observasi partisipatif dilakukan pada kegiatan kelompok nelayan, pertemuan program, serta aktivitas masyarakat pesisir untuk memahami dinamika sosial dan pola interaksi secara langsung. Ketiga, analisis dokumen mencakup telaah terhadap laporan pelaksanaan program, dokumen evaluasi, peraturan daerah, dan arsip kelembagaan guna memperoleh data sekunder yang memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik (thematic analysis) yang menekankan pada identifikasi, pengorganisasian, dan interpretasi makna dari pola-pola temuan. Tahapan analisis mencakup: (1) transkripsi hasil wawancara, (2) proses koding terbuka untuk mengelompokkan informasi penting, (3) identifikasi tema utama dan subtema, (4) analisis hubungan antar tema, serta (5) penarikan kesimpulan interpretatif. Validitas hasil penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan peneliti, guna memastikan konsistensi serta kredibilitas data. Seluruh proses analisis dibantu oleh perangkat lunak NVivo 12, yang berfungsi mengelola data kualitatif secara sistematis dan meningkatkan transparansi proses analisis.

Profil Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Lokasi Penelitian

Penelitian komparatif di tiga kabupaten pesisir di Indonesia, Indramayu (Jawa Barat), Pati (Jawa Tengah), dan Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat) mengungkapkan heterogenitas signifikan dalam pendekatan, implementasi, dan capaian program pembangunan kelautan dan perikanan. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi konteks sosial-ekonomi dan ekologis, tetapi juga menunjukkan disparitas dalam kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kesiapan masyarakat, serta komitmen politik terhadap pembangunan sektor kelautan yang berkelanjutan.

Kabupaten Indramayu: Model Ekonomi Berbasis Perikanan Tangkap Tradisional

Kabupaten Indramayu, yang terletak di pantai utara Jawa Barat, memiliki sejarah panjang sebagai salah satu sentra perikanan tangkap terbesar di Indonesia. Dengan garis pantai sepanjang 147 kilometer dan populasi nelayan mencapai lebih dari 45.000 orang, sektor perikanan tangkap menyumbang

18,3% dari PDRB Indramayu pada tahun 2022 (BPS Indramayu, 2023). Namun, produktivitas sektor ini mengalami stagnasi dalam dekade terakhir akibat degradasi sumber daya ikan, keterbatasan teknologi, dan ketergantungan pada sistem penangkapan konvensional. Program Minapolitan berbasis Perikanan Tangkap: yang diimplementasikan selama periode 2020-2023 dirancang sebagai intervensi strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan anggaran total Rp15 miliar yang bersumber dari APBD (60%) dan APBN (40%), program ini menargetkan modernisasi armada perikanan melalui distribusi 500 unit *GPS fish finder*, rehabilitasi 300 kapal nelayan, dan pelatihan keselamatan maritim bagi 1.200 nelayan.

Program modernisasi perikanan tangkap ini menetapkan sasaran yang ambisius meningkatkan produksi sebesar 20%, dari 85.000 ton menjadi 102.000 ton per tahun, dan menaikkan pendapatan nelayan sebesar 25%, dari Rp3,5 juta menjadi Rp4,4 juta per bulan. Namun, hasil evaluasi hingga akhir tahun 2023 menunjukkan capaian yang belum sejalan dengan harapan. Produksi baru meningkat 15,6%, sementara pendapatan nelayan naik 19,5%, sehingga tingkat keberhasilan keseluruhan program tercatat hanya 78% dari target.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa sejumlah faktor mendasar masih menjadi penghambat utama. Ketergantungan nelayan pada subsidi bahan bakar membuat efisiensi teknologi baru seperti *GPS fish finder* tidak sepenuhnya menghasilkan dampak optimal. Kenaikan harga solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter pada tahun 2022 mendorong sebagian besar nelayan kecil mengurangi aktivitas melaut sekitar 43% di antaranya kini hanya beroperasi 12–15 hari per bulan, turun dari sebelumnya 20 hari. Di sisi lain, perubahan iklim dan cuaca ekstrem semakin mempersempit ruang gerak nelayan. Fenomena *La Niña* pada periode 2022–2023 menimbulkan gelombang tinggi dan badai berkepanjangan yang mengurangi hari melaut efektif hingga sepertiga dari waktu normal. Situasi ini tidak hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga menambah risiko keselamatan di laut. Masalah akses pasar juga muncul sebagai hambatan struktural yang belum tersentuh oleh intervensi program. Rantai pemasaran yang masih dikuasai tengkulak menyebabkan nelayan hanya menerima 45–55% dari harga jual di tingkat konsumen akhir. Ketimpangan posisi tawar dan lemahnya jaringan distribusi membuat peningkatan kapasitas teknologi belum berbanding lurus dengan kesejahteraan. Di lapangan, muncul pula gejala ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Wawancara mendalam mengungkapkan bahwa sebagian besar nelayan

penerima bantuan masih berharap program subsidi dilanjutkan. Hal ini menunjukkan transformasi menuju kemandirian ekonomi belum terwujud secara nyata.

Seorang ketua kelompok nelayan tradisional di Desa Eretan Kulon menyampaikan,

“Alat GPS bagus, kami bisa tahu di mana ikan berkumpul. Tapi kalau solar mahal dan cuaca buruk, ya percuma. Yang kami butuh bukan cuma alat, tapi jaminan harga jual dan modal kerja yang stabil.”
(Wawancara, 15 Agustus 2023)

Temuan-temuan ini menegaskan bahwa pendekatan yang semata berorientasi pada teknologi tidak cukup untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Modernisasi perikanan memerlukan strategi yang lebih holistik, menggabungkan inovasi teknis dengan penguatan kapasitas sosial, kelembagaan, serta tata kelola pasar agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh nelayan sebagai pelaku utama di sektor ini.

Kabupaten Pati: Inovasi Budi Daya Air Payau Berbasis Teknologi Adaptif

Kabupaten Pati di pesisir utara Jawa Tengah memiliki profil yang berbeda dengan Indramayu. Dengan luas lahan tambak mencapai 4.200 hektar, Pati mengembangkan sektor budi daya air payau khususnya udang vaname dan ikan bandeng sebagai tulang punggung ekonomi pesisir. Namun, produktivitas rendah (rata-rata 2,5 ton/ha/tahun) akibat sistem budi daya tradisional dan degradasi kualitas air menjadi tantangan utama. Program Budi daya Air Payau Berbasis Teknologi Bioflok diluncurkan pada 2021 dengan anggaran Rp8 miliar dan durasi tiga tahun. Teknologi bioflok, yang menggunakan mikroorganisme untuk mengolah limbah organik menjadi pakan alami sekaligus menjaga kualitas air, menjanjikan peningkatan produktivitas hingga 300% dengan efisiensi penggunaan air dan pakan yang lebih tinggi. Target program mencakup peningkatan produksi menjadi 500 ton per tahun dengan melibatkan 200 pembudi daya. Namun, fase awal implementasi menghadapi resistensi signifikan: hanya 35% pembudi daya yang bersedia mengadopsi teknologi ini. Faktor utama penolakan adalah persepsi bahwa teknologi bioflok terlalu kompleks, memerlukan investasi awal tinggi (Rp25-30 juta per kolam), dan berisiko tinggi bagi pembudi daya tradisional yang tidak familiar dengan sistem intensif.

Terobosan kritis terjadi pada tahun kedua program ketika tim pendamping

melakukan adaptasi teknologi menggunakan material lokal: mengganti bak fiber mahal dengan drum plastik bekas, memanfaatkan bambu untuk aerasi, dan memodifikasi formulasi probiotik dengan bahan lokal seperti dedak dan molase. Inovasi ini menurunkan biaya investasi hingga 60% (menjadi Rp10-12 juta per kolam) dan menyederhanakan prosedur operasional. Dampaknya luar biasa, tingkat adopsi melonjak menjadi 78%, produksi meningkat 2,5 kali lipat (dari 1,2 ton/ha menjadi 3,0 ton/ha), dan masa panen udang vaname diperpendek dari 120 hari menjadi 90 hari. Namun, capaian keseluruhan masih berada di level 65% karena keterlambatan implementasi pada fase awal dan keterbatasan akses pembiayaan bagi pembudi daya skala kecil.

Seorang pembudi daya udang di Desa Puncel, Kecamatan Dukuhseti, menceritakan pengalamannya:

“Awalnya saya ragu, pikir bioflok itu mahal dan ribet. Tapi setelah lihat tetangga berhasil pakai drum bekas dan bambu, saya coba. Hasilnya luar biasa, panen lebih cepat, udang lebih sehat, dan untung naik hampir dua kali lipat.” (Wawancara, 6 September 2023)

Pengalaman Pati mendemonstrasikan pentingnya inovasi adaptif yang mempertimbangkan konteks lokal, kapasitas ekonomi masyarakat, dan kearifan lokal dalam penerapan teknologi modern. Pendekatan partisipatif dalam modifikasi teknologi juga meningkatkan *sense of ownership* dan keberlanjutan program.

Kabupaten Lombok Utara: Model Pembangunan Terintegrasi Berbasis Ekowisata Bahari

Lombok Utara merepresentasikan paradigma pembangunan pesisir yang paling progresif di antara ketiga lokasi penelitian. Dengan potensi keindahan alam bawah laut yang luar biasa termasuk tiga Gili (Gili Trawangan, Meno, dan Air) yang telah menjadi destinasi wisata internasional kabupaten ini mengembangkan model pembangunan terintegrasi yang mensinergikan ekowisata bahari, konservasi ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Program Wisata Bahari Berbasis Masyarakat Terintegrasi (2019-2024) didesain dengan filosofi bahwa keberlanjutan ekologi adalah prasyarat bagi keberlanjutan ekonomi. Melalui anggaran Rp12 miliar, program ini tidak hanya fokus pada pengembangan infrastruktur wisata, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, konservasi terumbu karang, dan diversifikasi mata pencaharian. Target utama program meliputi: (1) menarik 50.000 wisatawan per tahun ke destinasi

wisata community-based, (2) meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat pengelola (Pokdarwis) menjadi Rp15 juta per bulan, dan (3) memulihkan 25 hektar ekosistem terumbu karang yang terdegradasi. Yang membedakan Lombok Utara adalah landasan kebijakan yang kuat: Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir menetapkan zonasi konservasi, mengalokasikan 4,5% APBD untuk program kelautan, dan memberikan insentif fiskal bagi usaha ramah lingkungan. Komitmen politik ini diterjemahkan dalam pendekatan partisipatif penuh di mana masyarakat terlibat sejak tahap perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi.

Hasilnya, program mencapai tingkat capaian 82% tertinggi di antara tiga lokasi. Kunjungan wisata ke Desa Gili Indah mencapai 41.000 wisatawan pada 2023, Pokdarwis memperoleh pendapatan rata-rata Rp12,3 juta per bulan, dan tutupan terumbu karang meningkat dari 35% menjadi 58% dalam empat tahun. Yang tidak kalah penting, program ini menciptakan efek multiplikator: berkembangnya UMKM lokal (kuliner, kerajinan, homestay), terciptanya 320 lapangan kerja baru, dan munculnya kesadaran konservasi yang kuat di kalangan masyarakat dibuktikan dengan penolakan masyarakat terhadap rencana reklamasi pantai untuk hotel besar pada 2022. Ketua Pokdarwis Gili Indah menjelaskan:

“Di sini berbeda dari tempat lain. Kami yang mengusulkan program wisata bahari ini sejak awal, ikut merencanakan, mengelola, dan mengawasi. Pemerintah hanya mendampingi dan memfasilitasi. Hasilnya, kami punya rasa memiliki yang kuat dan program ini berjalan terus tanpa tergantung bantuan.” (Wawancara, 22 September 2023)

Analisis Komparatif Capaian Program

Pada Tabel 1 menyajikan perbandingan sistematis capaian program pembangunan kelautan dan perikanan di tiga wilayah penelitian, yaitu Indramayu, Pati, dan Lombok Utara. Ketiga lokasi ini mewakili karakteristik sosial-ekonomi dan pendekatan implementasi yang berbeda mulai dari model top-down paternalistik hingga partisipatif berbasis komunitas. Perbandingan ini tidak hanya menggambarkan capaian kuantitatif terhadap target produksi dan pendapatan, tetapi juga menyoroti dimensi kualitatif berupa keberlanjutan program, pola partisipasi masyarakat, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Tabel 1. Perbandingan Capaian Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Tiga Wilayah Penelitian.

Indikator	Indramayu		Pati		Lombok Utara	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Peningkatan Produksi/ Output	20%	15,6% (78%)	500 ton/thn	325 ton (65%)	50.000 wisatawan	41.000 (82%)
Peningkatan Pendapatan*	25%	19,5% (78%)	200 pembudidaya	130 pembudidaya (65%)	Rp15 juta/bln	Rp12,3 juta (82%)
Durasi Program	3 thn	3 thn	3 thn	3 thn	5 thn	5 thn
Anggaran Total (Rp. Miliar)	15	15	8	8	12	12
Keberlanjutan Pasca- Program	Parsial (45%)	-	Parsial (52%)	-	Tinggi (78%)	-
Model Implementasi Dominan	Paternalistik	-	Kemitraan	-	Partisipatif	-
Tingkat Partisipasi Masyarakat (Rerata) (Konsultasi)	3,8	-	4,2 (Kemitraan)	-	6,5 (Delegasi)	-

Keterangan: * Peningkatan pendapatan disesuaikan pada setiap lokasi.

Hasil perbandingan menunjukkan variasi signifikan dalam capaian antarwilayah. Indramayu, yang menerapkan model implementasi paternalistik, mencatat peningkatan produksi sebesar 15,6% dari target 20% dan peningkatan pendapatan nelayan sebesar 19,5% dari target 25%, dengan tingkat keberlanjutan pasca-program masih parsial (45%). Pati, yang menggunakan pendekatan kemitraan, menunjukkan capaian produksi 325 ton dari target 500 ton (65%) serta peningkatan pendapatan bagi 130 dari 200 pembudidaya (65%), namun efektivitasnya masih terbatas meskipun efisiensi anggarannya relatif tinggi. Sementara itu, Lombok Utara, dengan pendekatan partisipatif, mencatat capaian tertinggi: produksi mencapai 82% dari target dan peningkatan pendapatan hingga Rp12,3 juta per bulan (82%), disertai tingkat keberlanjutan program pasca-bantuan sebesar 78%.

Analisis lebih lanjut memperlihatkan adanya korelasi positif antara tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas program. Lombok Utara, dengan tingkat partisipasi masyarakat rata-rata 6,5 (kategori delegasi), menunjukkan hasil paling optimal dan keberlanjutan yang kuat, sementara Indramayu dan Pati yang masih dominan dengan pendekatan top-down hanya mencapai capaian 78% dan 65%. Selain itu, dukungan kebijakan daerah berperan penting dalam menjaga kesinambungan hasil. Lombok Utara, dengan dukungan peraturan daerah (Perda) dan alokasi APBD yang konsisten, mampu mempertahankan kegiatan ekonomi kelautan meski bantuan pemerintah pusat telah berakhir. Hasil perbandingan tiga wilayah tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan kelautan dan perikanan sangat dipengaruhi oleh

dinamika sosial dan kelembagaan di tingkat lokal. Kinerja program tidak semata ditentukan oleh besar kecilnya anggaran atau kecanggihan teknologi yang diterapkan, melainkan oleh bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi melibatkan masyarakat secara bermakna. Di wilayah yang menerapkan pendekatan partisipatif seperti Lombok Utara, keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya mempercepat adopsi inovasi, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap hasil program. Sebaliknya, di daerah dengan pola teknokrat-sentralistik seperti Indramayu, partisipasi masyarakat masih bersifat konsultatif sehingga keberlanjutan program pasca intervensi pemerintah relatif lemah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penguatan tata kelola berbasis kolaborasi menjadi faktor kunci untuk memastikan hasil program tidak berhenti pada output jangka pendek, melainkan berkembang menjadi perubahan struktural yang lebih mandiri dan adaptif di tingkat komunitas pesisir.

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM

Partisipasi masyarakat kini menjadi *jantung kebijakan pembangunan inklusif*, bukan sekadar pelengkap administratif. Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, partisipasi bukan hanya berbicara tentang kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga tentang seberapa besar ruang kendali mereka terhadap keputusan, sumber daya, dan arah program. Pergeseran paradigma ini menuntut redefinisi posisi masyarakat dari penerima manfaat pasif menjadi aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Namun,

kenyataannya, *partisipasi masih kerap bersifat simbolik dan prosedural*. Banyak program yang diklaim partisipatif, tetapi dalam praktiknya, masyarakat hanya dilibatkan untuk melegitimasi kebijakan yang sudah dirancang secara top-down. Untuk menilai kedalaman dan kualitas partisipasi, penelitian ini menggunakan kerangka Tangga Partisipasi Arnstein (1969) sebagai alat analisis kritis terhadap praktik partisipasi di lapangan.

Kerangka Konseptual *Arnstein's Ladder of Participation*

Model *Arnstein's Ladder of Participation* menggambarkan delapan tingkat partisipasi masyarakat yang dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu non-partisipasi, tokenisme, dan kekuatan warga (Tabel 2).

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada kategori non-partisipasi (tangga 1–2), yaitu manipulasi dan terapi, masyarakat tidak memiliki kekuasaan dalam menentukan arah kebijakan. Pada tahap ini, partisipasi hanya digunakan sebagai legitimasi formal terhadap program yang telah dirancang pemerintah, di mana masyarakat diposisikan sebagai objek penerima manfaat atau sasaran pembinaan. Selanjutnya, kategori tokenisme (tangga 3–5), yang meliputi pemberian informasi, konsultasi, dan penentraman, menggambarkan situasi di mana masyarakat mulai dilibatkan dalam proses komunikasi dan penyampaian pendapat. Namun demikian, kekuasaan untuk mengambil keputusan tetap berada pada pihak pemerintah atau lembaga pelaksana. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat bersifat semu karena tidak menjamin adanya pengaruh terhadap hasil akhir kebijakan. Kategori tertinggi adalah kekuatan warga (tangga 6–8), yang mencakup kemitraan, kekuasaan terdelegasi, dan kontrol warga. Pada tahap ini, masyarakat memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengawasi kebijakan publik. Bentuk partisipasi semacam

ini mencerminkan pemberdayaan sejati, di mana masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga pemegang kendali dalam menentukan prioritas pembangunan.

Model Arnstein menegaskan bahwa kualitas partisipasi tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang melibatkan masyarakat, melainkan dari sejauh mana kekuasaan dan tanggung jawab benar-benar diberikan kepada mereka. Semakin tinggi posisi masyarakat dalam tangga partisipasi, semakin besar pula potensi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Distribusi Tingkat Partisipasi di Lokasi Penelitian

Analisis terhadap 47 program pembangunan kelautan dan perikanan di tiga kabupaten (Indramayu, Pati, dan Lombok Utara) menunjukkan ketimpangan partisipasi yang signifikan antarwilayah. Sebanyak 67% program berada pada level tokenisme, menggambarkan partisipasi yang bersifat ritualistik, bukan transformatif.

Tabel 3. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Tiga Kabupaten

Hasil analisis menunjukkan adanya variasi yang tajam dalam tingkat partisipasi masyarakat antarwilayah. Di Indramayu dan Pati, pola partisipasi masih didominasi oleh tokenisme, di mana keterlibatan masyarakat bersifat prosedural dan terbatas pada tahap sosialisasi serta konsultasi. Masyarakat lebih berperan sebagai penerima informasi daripada pengambil keputusan, mencerminkan pendekatan yang masih top-down. Berbeda dengan itu, Lombok Utara menampilkan pola yang jauh lebih progresif sekitar 80% program telah mencapai kategori “kekuatan warga”, menandakan kematangan kelembagaan lokal dan tumbuhnya otonomi komunitas dalam mengelola sumber daya pesisir. Wilayah ini bahkan tidak memiliki program dengan karakter non-partisipatif,

Tabel 2. Kategori dan Tingkatan dalam *Arnstein's Ladder of Participation*.

Kategori	Tingkat Partisipasi	Ciri Utama
Non-Partisipasi (Tangga 1–2)	1. Manipulasi 2. Terapi	Masyarakat hanya berperan sebagai objek legitimasi kebijakan atau penerima “pembinaan” secara paternalistik.
Tokenisme (Tangga 3–5)	3. Pemberian Informasi 4. Konsultasi 5. Penentraman	Masyarakat diberi ruang berpendapat namun tanpa kekuasaan untuk memengaruhi keputusan.
Kekuatan Warga (Tangga 6–8)	6. Kemitraan 7. Kekuasaan Terdelegasi 8. Kontrol Warga	Masyarakat menjadi mitra sejajar pemerintah, bahkan memiliki kontrol atas perencanaan dan pelaksanaan program.

Tabel 3. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Tiga Kabupaten.

Tingkat Partisipasi	Indramayu (%)	Pati (%)	Lombok Utara (%)	Rata-Rata (%)	Kategori
Kontrol Masyarakat	0	5	25	10	Kekuatan Warga
Kekuasaan Delegasi	5	8	20	11	Kekuatan Warga
Kemitraan	10	12	35	19	Kekuatan Warga
Subtotal Kekuatan Warga	15	25	80	40	—
Penentraman	15	20	15	17	Tokenisme
Konsultasi	35	30	5	23	Tokenisme
Pemberian Informasi	25	20	0	15	Tokenisme
Subtotal Tokenisme	75	70	20	55	—
Terapi	5	3	0	3	Non-Partisipasi
Manipulasi	5	2	0	2	Non-Partisipasi
Subtotal Non-Partisipasi	10	5	0	5	—

memperlihatkan pergeseran paradigma yang jelas dari model pembangunan paternalistik menuju pendekatan kolaboratif berbasis kepercayaan dan kemitraan. Kontras antarwilayah tersebut menegaskan adanya kesenjangan kelembagaan dan kepemimpinan lokal sebagai faktor penentu utama yang memengaruhi kedalaman partisipasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan kelautan dan perikanan.

Dinamika Partisipasi: Perspektif Pelaku di Lapangan

Pendalaman wawancara menunjukkan bagaimana masyarakat memaknai partisipasi secara berbeda tergantung konteks wilayah dan relasi kekuasaan dengan pemerintah. Tabel 4 menggambarkan dinamika tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan kelautan dan perikanan di tiga kabupaten yang memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan berbeda. Indramayu menampilkan bentuk partisipasi yang masih berada pada tingkat

konsultasi, di mana masyarakat hanya dilibatkan secara formal melalui kegiatan sosialisasi tanpa memiliki pengaruh nyata terhadap arah kebijakan atau keputusan program. Kutipan “*Kami hanya dipanggil rapat sosialisasi, terus diminta tanda tangan. Perencanaannya sudah jadi dari atas*” menunjukkan bahwa proses partisipasi lebih bersifat simbolik, sekadar memenuhi prosedur administratif tanpa memberi ruang bagi aspirasi masyarakat untuk diakomodasi.

Sebaliknya, Pati memperlihatkan adanya sedikit kemajuan dengan tingkat partisipasi pada kategori kemitraan terbatas. Dalam konteks ini, masyarakat mulai diberi ruang untuk beradaptasi secara teknis, misalnya dalam pemilihan metode atau inovasi produksi, namun keputusan strategis seperti pengalokasian anggaran dan arah program masih sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dalam pernyataan warga bahwa mereka “*boleh usulkan modifikasi teknologi, tapi soal anggaran tetap ditentukan dinas*,” yang menggambarkan adanya ruang kolaborasi, tetapi belum sepenuhnya otonom.

Tabel 4. Karakteristik Partisipasi Berdasarkan Perspektif Masyarakat di Tiga Kabupaten.

Kabupaten	Tingkat Partisipasi Dominan	Karakteristik Utama	Kutipan Representatif
Indramayu	Konsultasi (Tokenisme)	Keterlibatan bersifat formalitas; masyarakat hanya hadir dalam rapat sosialisasi tanpa memengaruhi kebijakan.	“Kami hanya dipanggil rapat sosialisasi, terus diminta tanda tangan. Perencanaannya sudah jadi dari atas.”
Pati	Kemitraan Terbatas	Masyarakat memiliki ruang adaptasi teknis, tetapi keputusan strategis tetap di tangan pemerintah.	“Kami boleh usulkan modifikasi teknologi, tapi soal anggaran tetap ditentukan dinas.”
Lombok Utara	Delegasi dan Kontrol Warga	Masyarakat menjadi pengambil keputusan utama, dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator.	“Kami yang mengusulkan, merancang, dan mengelola. Pemerintah hanya membantu dan mengawasi.”

Sementara itu, Lombok Utara menempati posisi paling maju dengan tingkat partisipasi mencapai delegasi dan kontrol warga, di mana masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung dan memastikan keberlanjutan kegiatan masyarakat. Pernyataan “*Kami yang mengusulkan, merancang, dan mengelola. Pemerintah hanya membantu dan mengawasi*” memperlihatkan peran pemerintah dari pengendali menjadi mitra. Kondisi ini mencerminkan kematangan kelembagaan lokal dan tumbuhnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Faktor-Faktor Penentu Tingkat Partisipasi

Perbedaan tingkat partisipasi antarwilayah dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, kelembagaan, dan politik. Tabel berikut menampilkan analisis kebijakan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi variasi tingkat partisipasi masyarakat di tiga kabupaten, yaitu Lombok Utara, Pati, dan Indramayu. Perbedaan tingkat partisipasi ini mencerminkan bahwa efektivitas pelibatan masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh konteks tata kelola lokal yang meliputi kapasitas sosial, kepemimpinan politik, kekuatan kelembagaan, dan dukungan regulasi. Dengan demikian, pendekatan kebijakan publik yang berorientasi pada partisipasi perlu melihat faktor-faktor tersebut sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan daerah, bukan sekadar pelengkap kegiatan teknis.

Dari sisi kapasitas sosial, Lombok Utara menunjukkan kondisi yang paling kondusif bagi partisipasi bermakna. Tingkat pendidikan dan

eksposur masyarakat yang tinggi membentuk kepercayaan diri serta daya tawar yang kuat dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan publik. Hal ini diperkuat oleh kepemimpinan politik yang konsisten dan visioner, yang tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga menginstitusionalisasikan partisipasi masyarakat melalui regulasi daerah dan pemberian insentif berbasis kinerja komunitas. Kelembagaan lokal seperti *Pokdarwis* berfungsi sebagai simpul kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi mekanisme akuntabilitas sosial yang menjaga transparansi dan kesinambungan program.

Sementara itu, Pati merepresentasikan wilayah dengan kapasitas partisipatif yang berkembang namun belum stabil. Masyarakat mulai terlibat dalam proses adaptasi teknis dan inovasi lokal, tetapi ruang pengambilan keputusan strategis masih didominasi pemerintah. Fluktuasi kepemimpinan antarperiode pemerintahan serta belum adanya regulasi yang secara eksplisit menjamin hak partisipasi menyebabkan partisipasi masyarakat lebih bersifat proyek-sentris daripada institusional. Untuk memperkuat partisipasi di wilayah seperti ini, kebijakan publik perlu diarahkan pada *policy continuity* dan pembangunan kelembagaan yang melampaui siklus politik. Sebaliknya, Indramayu menggambarkan tantangan klasik dalam implementasi kebijakan partisipatif di tingkat daerah. Rendahnya literasi sosial dan teknis, lemahnya kelembagaan masyarakat, serta tidak adanya kerangka hukum yang menjamin partisipasi publik menyebabkan keterlibatan masyarakat bersifat pasif dan administratif. Partisipasi muncul hanya sebagai respons terhadap program pemerintah, bukan sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan publik, kondisi ini menegaskan perlunya *capacity*

Tabel 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat.

Faktor Penentu	Kondisi			Implikasi Kebijakan
	Lombok Utara	Pati	Indramayu	
Kapasitas dan Kesadaran Masyarakat	Tingkat pendidikan dan eksposur tinggi, mendorong kepercayaan diri dan daya tawar	Sedang, terbatas pada kelompok inti	Rendah, partisipasi lebih bersifat pasif	Diperlukan peningkatan literasi sosial dan teknis masyarakat
Kepemimpinan dan Komitmen Politik	Konsisten dan visioner, mendukung partisipasi sejati	Fluktuatif antarperiode pemerintahan	Tidak konsisten, bersifat programatis	Perlu keberlanjutan visi politik dan stabilitas birokrasi
Kelembagaan Lokal	Kuat dan akuntabel (<i>Pokdarwis</i>)	Sedang, tergantung proyek	Lemah, baru terbentuk saat program berjalan	Perlu penguatan organisasi masyarakat dan mekanisme akuntabilitas
Kerangka Regulasi dan Insentif	Ada Perda partisipatif dan insentif bagi pengelolaan berbasis masyarakat	Belum ada regulasi pendukung	Tidak ada landasan hukum partisipasi	Penting membentuk regulasi daerah yang menjamin hak partisipasi

building berbasis masyarakat, penguatan organisasi lokal, serta penataan regulasi yang memastikan hak warga untuk terlibat secara substantif dalam proses pembangunan.

Implikasi Partisipasi terhadap Efektivitas dan Keberlanjutan Program

Tabel 6 menyajikan hasil analisis kuantitatif yang menunjukkan hubungan kuat antara tingkat partisipasi masyarakat dan keberhasilan program pembangunan kelautan dan perikanan di tiga wilayah penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau dukungan teknis, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat terlibat secara bermakna dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian, partisipasi bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan variabel kebijakan strategis yang menentukan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat partisipasi memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap seluruh indikator keberhasilan program. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,68 ($p < 0,01$) untuk capaian target program mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin efektif pelaksanaan kegiatan di lapangan. Masyarakat yang dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan rasa memiliki yang lebih besar, meningkatkan efisiensi implementasi, dan memperkecil resistensi terhadap perubahan. Korelasi yang lebih tinggi, yaitu 0,72 ($p < 0,01$), terlihat pada indikator keberlanjutan program. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi sejati bukan hanya mempercepat pencapaian hasil jangka pendek, tetapi juga memperpanjang umur program setelah bantuan pemerintah berakhir. Di wilayah seperti Lombok Utara, di mana masyarakat memiliki kendali dan kapasitas kelembagaan yang kuat, keberlanjutan kegiatan ekonomi pasca-program mampu terjaga tanpa ketergantungan terhadap intervensi eksternal.

Selain itu, nilai korelasi 0,65 ($p < 0,01$) antara partisipasi dan inovasi lokal memperlihatkan bahwa pelibatan masyarakat menjadi katalis penting bagi adaptasi teknologi dan pengembangan ide-ide kreatif yang sesuai dengan konteks lokal. Program yang membuka ruang partisipatif cenderung lebih inovatif karena menggabungkan pengetahuan teknis dengan pengalaman empiris masyarakat setempat. Dalam perspektif kebijakan publik, temuan ini memperkuat teori *participatory development* yang memandang partisipasi tidak sekadar sebagai hak normatif warga negara, tetapi sebagai instrumen strategis peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan kebijakan. Namun demikian, sebagian besar program pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia masih terjebak dalam bentuk partisipasi simbolik (*tokenism*), di mana masyarakat hanya dilibatkan untuk memenuhi persyaratan prosedural tanpa ruang untuk memengaruhi keputusan substantif. Untuk menghindari jebakan tersebut, dibutuhkan pergeseran paradigma kebijakan menuju partisipasi transformatif, yang ditopang oleh empat pilar utama: (1) penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang adaptif dan mandiri; (2) komitmen politik lokal yang konsisten terhadap pemberdayaan warga; (3) pembentukan kerangka hukum yang menjamin dan menginstitusionalisasikan hak partisipasi dalam pengambilan keputusan; serta (4) sistem insentif dan monitoring yang menilai kualitas partisipasi, bukan hanya kuantitas kegiatan.

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DITERAPKAN

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan merupakan inti dari pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*). Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai pengambil keputusan yang memiliki kepemilikan terhadap proses dan hasil pembangunan. Dalam wilayah pesisir, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis nelayan,

Tabel 6. Korelasi antara Tingkat Partisipasi dan Indikator Keberhasilan Program.

Indikator Program	Koefisien Korelasi (r)	Signifikansi (p)	Interpretasi
Capaian Target Program	0,68	< 0,01	Partisipasi tinggi meningkatkan efektivitas pelaksanaan program
Keberlanjutan Program	0,72	< 0,01	Partisipasi sejati memperpanjang umur program pasca-bantuan
Inovasi Lokal	0,65	< 0,01	Keterlibatan masyarakat mendorong adaptasi teknologi dan inovasi lokal

pembudidaya, atau pengolah hasil laut, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial, kelembagaan, dan kemampuan adaptif terhadap perubahan ekonomi, sosial, serta lingkungan. Hasil kajian di tiga wilayah penelitian, yaitu Indramayu, Pati, dan Lombok Utara, menunjukkan bahwa model pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan kelautan dan perikanan dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe utama. Ketiga tipe tersebut adalah model paternalistik, model kemitraan, dan model partisipatif. Ketiganya merepresentasikan tahapan evolusi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia yang bergerak dari pendekatan berbasis kontrol pemerintah menuju pendekatan yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada inisiatif masyarakat.

Tipologi dan Karakteristik Umum

Ketiga model pemberdayaan masyarakat tersebut berbeda dalam hal peran aktor, pola relasi kekuasaan, dan mekanisme partisipasi yang dijalankan. Model paternalistik cenderung bersifat top-down, di mana pemerintah menjadi perancang utama program. Model kemitraan menandai masa transisi, karena terdapat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat meskipun posisi masyarakat belum sepenuhnya setara. Model partisipatif menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator kebijakan.

Hasil analisis pada Tabel 7, menggambarkan dinamika evolusi pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, yang ditunjukkan melalui tiga model utama: paternalistik, kemitraan, dan partisipatif. Masing-masing model mencerminkan perbedaan mendasar dalam hal peran pemerintah, peran masyarakat, arah kekuasaan, bentuk partisipasi, serta karakter umum yang dihasilkan dari hubungan antaraktor.

Pada model paternalistik, pemerintah berperan dominan sebagai penyedia utama sekaligus

pengendali penuh terhadap proses pembangunan. Masyarakat diposisikan hanya sebagai penerima manfaat pasif, sehingga arah kekuasaan bersifat top-down. Partisipasi masyarakat dalam model ini terbatas pada konsultasi formal, yang umumnya dilakukan sekadar untuk memenuhi aspek administratif tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi keputusan. Model ini sering kali dianggap efisien dalam jangka pendek, karena keputusan dapat diambil dengan cepat, namun tidak berkelanjutan sebab masyarakat tidak memiliki rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program yang dijalankan.

Berbeda dengan itu, model kemitraan menandai pergeseran menuju pendekatan yang lebih kolaboratif. Dalam model ini, pemerintah berperan sebagai partner sekaligus fasilitator teknis, sedangkan masyarakat mulai terlibat sebagai mitra aktif dalam implementasi program. Hubungan kekuasaan masih bersifat semi-hierarkis, karena kendali strategis umumnya tetap berada di tangan pemerintah, namun sudah ada upaya berbagi tanggung jawab. Bentuk partisipasi bersifat konsultatif dan kolaboratif, di mana masyarakat dilibatkan dalam tahap pelaksanaan, meskipun belum sepenuhnya dalam proses perencanaan dan evaluasi. Model ini mencerminkan situasi yang sinergis namun belum setara, menjadi masa transisi penting menuju pemberdayaan yang lebih sejati. Sementara itu, model partisipatif merepresentasikan tingkat pemberdayaan tertinggi. Dalam pendekatan ini, masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama sekaligus pengambil keputusan, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator kebijakan. Arah kekuasaan bersifat horizontal, mencerminkan hubungan yang setara dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Bentuk partisipasi yang muncul adalah inklusif dan deliberatif, artinya seluruh anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk berpendapat dan terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Model ini menciptakan pemberdayaan sejati yang bersifat

Tabel 7. Tipologi Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Model	Peran Pemerintah	Peran Masyarakat	Arah Kekuasaan	Bentuk Partisipasi	Karakter Umum
Paternalistik	Penyedia utama dan pengendali penuh	Penerima manfaat pasif	Top-down	Konsultasi formal	Efisien tetapi tidak berkelanjutan
Kemitraan	Partner dan fasilitator teknis	Mitra aktif dalam implementasi	Semi-hierarkis	Konsultatif dan kolaboratif	Sinergis namun belum setara
Partisipatif	Fasilitator dan regulator	Subjek utama dan pengambil keputusan	Horizontal	Inklusif dan deliberatif	Pemberdayaan sejati, berkelanjutan

berkelanjutan, karena masyarakat memiliki kontrol atas sumber daya dan proses pembangunan yang memengaruhi kehidupannya.

Model Paternalistik: Ketergantungan yang Tersistematis

Model paternalistik masih mendominasi sebagian besar program pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah yang kelembagaan masyarakatnya belum kuat. Pemerintah memegang kendali penuh atas desain, pendanaan, serta pelaksanaan program. Dalam model ini, masyarakat berperan sebagai penerima manfaat yang posisinya pasif dan tidak memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan. Contoh yang menggambarkan karakter paternalistik terlihat pada Program *Minapolitan* berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu. Pemerintah menentukan semua tahapan kegiatan secara terpusat, mulai dari penyediaan sarana, teknologi, hingga pelatihan. Keterlibatan masyarakat sebatas menghadiri sosialisasi dan menandatangani daftar hadir kegiatan. Akibatnya, sebagian besar bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Banyak alat tangkap maupun sarana produksi tidak dimanfaatkan secara optimal karena tidak kompatibel dengan kapasitas dan konteks sosial masyarakat pesisir.

Efektivitas program dengan pendekatan paternalistik hanya mencapai 35 persen, dengan tingkat keberlanjutan 15 persen. Tingkat kepuasan masyarakat tercatat sebesar 58 persen, sementara inovasi lokal hanya muncul sebesar 12 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu birokratis cenderung menimbulkan ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan pemerintah. Masyarakat tidak ter dorong untuk membangun inisiatif sendiri, dan proses pemberdayaan berhenti pada tataran administratif.

Model Kemitraan: Transisi Menuju Kolaborasi Setara

Model kemitraan mencerminkan upaya pemerintah untuk beralih dari pendekatan instruktif menuju pola kolaboratif. Dalam model ini, peran masyarakat mulai diakui dan diberi ruang untuk berpartisipasi, terutama dalam tahap pelaksanaan program. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator teknis dan penyedia sumber daya, sementara masyarakat menjadi mitra aktif yang berkontribusi dalam penyusunan solusi dan adaptasi lokal.

Implementasi model kemitraan dapat ditemukan pada Program *Budidaya Bioflok* di Kabupaten Pati. Pemerintah memberikan bantuan

sarana dasar dan pendampingan teknis, sedangkan kelompok pembudidaya mengembangkan inovasi berupa penggunaan bahan lokal seperti drum bekas untuk menekan biaya. Proses pembelajaran dua arah mulai terlihat di sini. Pemerintah mendapatkan umpan balik lapangan untuk memperbaiki kebijakan, sedangkan masyarakat memperoleh pengalaman manajemen dan teknis yang lebih baik.

Hasil evaluasi menunjukkan efektivitas program model kemitraan mencapai 65 persen, dengan tingkat keberlanjutan 45 persen. Kepuasan masyarakat meningkat hingga 72 persen, dan tingkat inovasi lokal mencapai 58 persen. Meskipun demikian, dominasi pemerintah masih terasa kuat pada tahap perencanaan dan evaluasi, sehingga kesetaraan dalam kemitraan belum sepenuhnya tercapai. Model ini berhasil menumbuhkan rasa memiliki terhadap program, namun masih perlu penguatan kelembagaan agar dapat berkembang menuju model partisipatif penuh.

Model Partisipatif: Masyarakat sebagai Penggerak Utama

Model partisipatif merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang paling matang, di mana masyarakat memiliki posisi sentral dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yang memastikan keberlanjutan serta keadilan antar pihak. Contohnya penerapan model partisipatif terdapat pada Program *Ekowisata Bahari* di Lombok Utara yang digerakkan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Gili Indah. Program ini lahir dari inisiatif masyarakat lokal sejak tahun 2018, yang kemudian difasilitasi pemerintah daerah dalam hal perizinan, pelatihan, dan promosi. Proses perencanaan dan pengelolaan dilakukan secara transparan melalui musyawarah tahunan yang melibatkan masyarakat, akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha.

Dampak dari pendekatan ini sangat signifikan. Efektivitas program mencapai 82 persen dengan keberlanjutan 78 persen, sementara kepuasan masyarakat mencapai 91 persen. Tingkat inovasi lokal juga sangat tinggi, yaitu 85 persen, ditunjukkan dengan munculnya berbagai ide pengembangan seperti konservasi berbasis wisata dan pengelolaan limbah laut menjadi suvenir. Walaupun biaya fasilitasi program lebih besar dibandingkan dua model lainnya, nilai pengembalian investasi (ROI) mencapai 3,8 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa investasi sosial pada kapasitas masyarakat menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berlipat.

Perbandingan Efektivitas Ketiga Model

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi yang diberikan kepada masyarakat. Semakin besar ruang partisipasi dan kontrol yang dimiliki masyarakat, semakin tinggi tingkat keberhasilan dan keberlanjutan program. Korelasi antara partisipasi dan keberlanjutan tercatat sebesar 0,78, sedangkan hubungan dengan efektivitas program sebesar 0,75.

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa model partisipatif secara konsisten menghasilkan nilai tertinggi pada semua indikator, terutama dalam hal inovasi lokal (85%), kepuasan masyarakat (91%), serta tingkat pengembalian investasi (ROI = 3,8). Sementara itu, model paternalistik memperlihatkan kinerja terendah karena dominasi pendekatan top-down yang menghambat partisipasi substantif masyarakat. Model kemitraan menempati posisi menengah, menandakan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, meskipun belum sepenuhnya berbasis pada kemandirian dan kontrol warga. Visualisasi ini memperkuat temuan analisis bahwa kedalaman partisipasi berbanding lurus dengan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan kelautan dan perikanan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PROGRAM

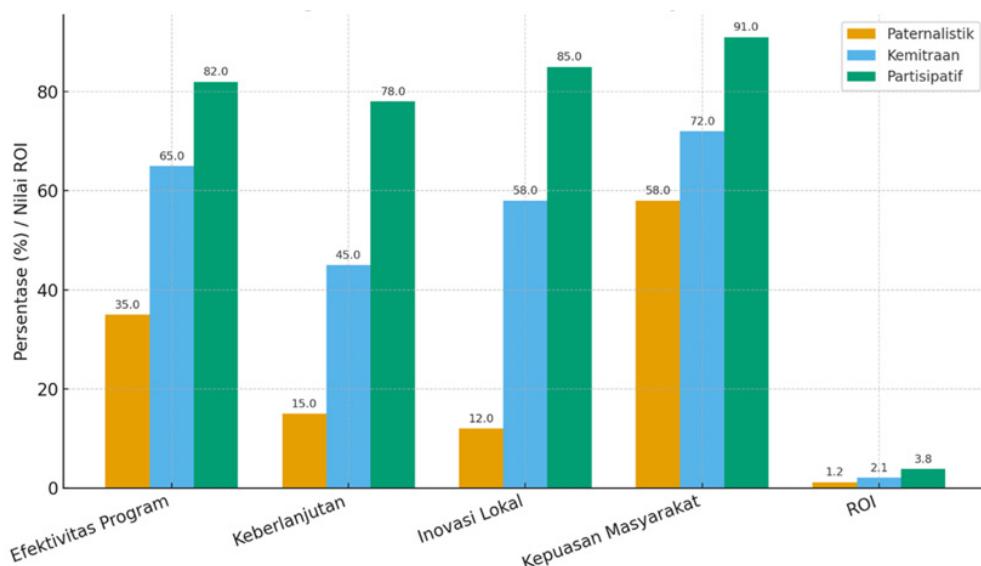
Bagian ini menguraikan secara mendalam faktor-faktor yang menentukan efektivitas program pembangunan kelautan dan perikanan, dengan menekankan bahwa keberhasilan tidak ditentukan

oleh satu variabel tunggal, melainkan oleh interaksi dinamis antara faktor internal (kapasitas masyarakat, kesesuaian teknologi) dan faktor eksternal (akses sumber daya dan dukungan kebijakan). Analisis empiris menunjukkan bahwa keempat faktor ini saling memperkuat kapasitas kelembagaan menciptakan basis tata kelola yang kuat, teknologi tepat guna memastikan relevansi program, akses sumber daya memperluas ruang gerak ekonomi, dan kebijakan publik yang konsisten menjadi payung yang melindungi keberlanjutan.

Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

Kapasitas kelembagaan masyarakat (*community institutional capacity*) merupakan fondasi utama dalam keberhasilan program pembangunan kelautan dan perikanan. Konsep ini mencakup kemampuan organisasi lokal untuk menjalankan fungsi-fungsi kritis seperti pengambilan keputusan kolektif, mobilisasi sumber daya, koordinasi aksi bersama, akuntabilitas, serta pembelajaran organisasi berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan adalah prediktor paling kuat terhadap efektivitas program ($\beta = 0,42$; $p < 0,001$), menegaskan bahwa kekuatan organisasi masyarakat jauh lebih menentukan daripada besarnya bantuan atau kecanggihan teknologi yang diberikan.

Kapasitas kelembagaan yang tangguh biasanya ditandai oleh empat dimensi utama. Pertama, struktur organisasi yang jelas, yang mencakup pembagian peran formal seperti ketua, sekretaris, dan bendahara, serta mekanisme pengambilan keputusan yang terdokumentasi dalam AD/ART.



Gambar 1. Perbandingan Efektivitas Tiga Model Pemberdayaan Masyarakat: Paternalistik, Kemitraan, dan Partisipatif.

Kedua, sistem akuntabilitas dan transparansi, di mana pelaporan keuangan dilakukan secara rutin, disertai audit internal dan mekanisme pengaduan yang mendorong kepercayaan anggota. Ketiga, kapasitas kepemimpinan yang berakar pada legitimasi, kompetensi, dan integritas moral pemimpin, serta adanya suksesi yang terencana untuk menjaga kesinambungan organisasi. Keempat, jejaring dan kemitraan, yakni kemampuan kelompok menjalin koneksi produktif dengan pemerintah, sektor swasta, lembaga akademik, dan LSM untuk memperluas akses terhadap informasi, teknologi, dan pasar.

Perbandingan empiris antara Pokdarwis Gili Indah di Lombok Utara dan Kelompok Nelayan Pabean Ilir di Indramayu menggambarkan kontras yang tajam dalam kualitas kelembagaan. Pokdarwis Gili Indah telah terdaftar secara legal sejak 2015 dengan struktur organisasi lengkap, rapat pengurus bulanan, dan laporan keuangan yang dipublikasikan di papan pengumuman desa. Kelompok ini juga memiliki kerja sama formal dengan 15 *travel agent*, tiga universitas, dan dua LSM konservasi, serta melaksanakan pemilihan pengurus secara demokratis setiap tiga tahun. Hasilnya, mereka mampu mengelola program wisata bahari secara mandiri, menghasilkan pendapatan rata-rata Rp12,3 juta per bulan, dan mempertahankan keberlanjutan program hingga empat tahun setelah dukungan pemerintah berakhir. Seperti disampaikan oleh bendahara kelompok, "Kelompok kami kuat karena ada aturan main yang jelas. Keuangan transparan, setiap bulan diumumkan dalam rapat. Kalau ada yang curang, langsung kena sanksi. Ini membuat anggota percaya dan mau berkontribusi."

Sebaliknya, Kelompok Nelayan Pabean Ilir di Indramayu menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan. Kelompok ini dibentuk secara ad-hoc ketika program dimulai pada 2020 tanpa legalitas formal maupun struktur organisasi yang jelas. Keputusan lebih banyak dikuasai oleh elit lokal, sementara transparansi keuangan nyaris tidak ada, menyebabkan distribusi bantuan tidak merata dan menimbulkan ketidakpercayaan di antara anggota. Tidak adanya jejaring eksternal membuat kelompok

sangat bergantung pada pemerintah, dan akhirnya bubar hanya delapan bulan setelah program berakhir. Bantuan alat GPS *fish finder* senilai Rp180 juta tidak dimanfaatkan secara optimal; sebagian besar alat rusak atau dijual karena biaya operasional terlalu tinggi. Seorang mantan anggota kelompok menuturkan, "Ketua saja ditunjuk oleh dinas, bukan dipilih. Uang bantuan tidak jelas pembagiannya, yang dekat ketua dapat lebih banyak. Akhirnya banyak anggota keluar."

Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program bukan semata hasil dari intervensi material, tetapi dari kualitas kelembagaan yang memampukan masyarakat untuk berorganisasi secara transparan, demokratis, dan adaptif. Di Lombok Utara, tingkat transparansi keuangan mencapai 90% dan keberlanjutan program 78%, sementara di Indramayu hanya 25% dan 18%. Dengan demikian, pembangunan kelembagaan yang kuat harus dilihat sebagai investasi jangka panjang bukan sekadar komponen administratif proyek, melainkan jantung dari tata kelola pembangunan berbasis masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel 8 memperlihatkan disparitas yang mencolok dalam kapasitas kelembagaan masyarakat di tiga kabupaten penelitian. Lombok Utara menempati posisi tertinggi dengan tingkat legalitas formal mencapai 85%, transparansi keuangan 90%, dan intensitas rapat organisasi hingga 15 kali per tahun. Tingginya nilai-nilai tersebut mencerminkan tata kelola kelembagaan yang matang dan akuntabel, di mana mekanisme pengambilan keputusan berjalan partisipatif dan sistem pelaporan dijalankan secara terbuka. Keberadaan jejaring eksternal yang luas melibatkan 12 mitra dari sektor publik dan swasta juga berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan program hingga 78% pasca-intervensi pemerintah. Sebaliknya, Indramayu menunjukkan kondisi paling lemah di hampir seluruh indikator. Legalitas formal kelompok hanya 20%, frekuensi rapat sangat rendah (3 kali per tahun), dan transparansi keuangan terbatas pada 25%. Minimnya jejaring eksternal dan lemahnya kapasitas organisasi menyebabkan

Tabel 8. Perbandingan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat di Tiga Kabupaten.

Indikator Kapasitas	Lombok Utara (Tinggi)	Pati (Moderate)	Indramayu (Rendah)
Legalitas Formal	85%	45%	20%
Frekuensi Rapat (per tahun)	15 kali	8 kali	3 kali
Transparansi Keuangan	90%	58%	25%
Jejaring Eksternal	12 partner	5 partner	1 partner
Keberlanjutan Program	78%	52%	18%

program tidak berlanjut setelah bantuan berakhir, dengan tingkat keberlanjutan hanya 18%. Situasi ini menunjukkan bahwa kelembagaan masyarakat di Indramayu masih bersifat reaktif dan bergantung pada arahan eksternal, bukan pada inisiatif internal. Pati berada pada posisi menengah, dengan kapasitas kelembagaan yang berkembang namun belum stabil. Legalitas formal dan transparansi keuangan sudah lebih baik dibanding Indramayu, namun masih belum cukup kuat untuk memastikan keberlanjutan program secara mandiri. Pola ini menunjukkan bahwa keberhasilan kelembagaan sangat dipengaruhi oleh konsistensi pendampingan dan kesinambungan dukungan kebijakan lokal.

Kesesuaian Teknologi dengan Kondisi Lokal

Kegagalan berbagai program pembangunan di sektor perikanan sering kali bukan disebabkan oleh kelemahan teknologinya, melainkan karena ketidaksesuaian teknologi dengan konteks sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pendekatan teknologi tepat guna (*appropriate technology*) menjadi penting dalam memastikan keberhasilan implementasi inovasi di lapangan. Prinsip dasar teknologi tepat guna meliputi lima dimensi utama, yakni keterjangkauan (*affordability*), kesederhanaan (*simplicity*), kemampuan adaptasi (*adaptability*), keberlanjutan (*sustainability*), dan penerimaan budaya (*cultural acceptability*).

Studi kasus penerapan teknologi bioflok pada budidaya udang di Kabupaten Pati menggambarkan dinamika ini dengan jelas. Pada tahap awal, program bioflok menghadapi resistensi tinggi dari pembudidaya karena teknologi tersebut dinilai terlalu mahal, kompleks, dan berisiko tinggi. Investasi awal yang mencapai Rp25–30 juta per kolam menjadi beban berat bagi petani dengan pendapatan rata-rata hanya Rp4 juta per bulan. Selain itu, kebutuhan monitoring ketat terhadap berbagai parameter air (pH, DO, TDS, dan lain-lain) membuat teknologi ini sulit diterapkan secara luas.

Hasil adaptasi tersebut tergambar pada Tabel 9, yang menunjukkan perubahan signifikan dalam berbagai indikator kinerja budidaya. Biaya investasi per kolam turun drastis sebesar 64% dari Rp28 juta menjadi Rp10 juta, menjadikannya teknologi lebih terjangkau. Dampaknya, tingkat adopsi meningkat dari 35% menjadi 78%, mencerminkan penerimaan yang lebih luas di kalangan pembudidaya. Dari sisi produktivitas, terjadi peningkatan hasil panen hingga 150%, dari 1,2 ton menjadi 3,0 ton per hektar per tahun, dengan kenaikan survival rate udang dari 65% menjadi 82%. Selain itu, masa panen berkurang 25% dari 120 menjadi 90 hari, sehingga perputaran modal menjadi lebih cepat dan pendapatan bersih meningkat hingga 133%, dari Rp15 juta menjadi Rp35 juta per siklus. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa adaptasi teknologi berbasis partisipasi lokal dapat mengubah teknologi yang awalnya dianggap tidak layak menjadi solusi yang efisien, berkelanjutan, dan diterima masyarakat. Keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada faktor teknis, tetapi juga pada kemampuan untuk menyesuaikan teknologi dengan realitas sosial dan ekonomi pembudidaya. Dengan demikian, model adaptasi bioflok di Pati dapat menjadi contoh nyata penerapan teknologi tepat guna yang memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Akses Terhadap Sumber Daya

Pada konteks kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, pemberdayaan masyarakat sering kali dipahami sebatas peningkatan kapasitas individu atau kelompok. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa tanpa akses yang memadai terhadap sumber daya kritis seperti modal, informasi pasar, teknologi, dan jaringan pemasaran pemberdayaan hanya menjadi retorika tanpa substansi. Akses terhadap sumber daya inilah yang menentukan sejauh mana masyarakat pesisir dapat benar-benar mandiri secara ekonomi dan berdaya dalam mengambil keputusan. Temuan empiris menunjukkan bahwa variabel akses sumber daya berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program pemberdayaan ($\beta = 0,38$, $p <$

Tabel 9. Dampak Adaptasi Teknologi Bioflok di Kabupaten Pati.

Indikator	Sebelum Adaptasi	Setelah Adaptasi	Perubahan
Biaya Investasi per Kolam	Rp28 juta	Rp10 juta	-64%
Tingkat Adopsi	35%	78%	+123%
Produktivitas (ton/ha/tahun)	1,2	3,0	+150%
Survival Rate Udang	65%	82%	+26%
Masa Panen (hari)	120	90	-25%
Pendapatan Bersih (Rp/siklus)	Rp15 juta	Rp35 juta	+133%

0,01). Artinya, program yang berhasil bukan hanya yang memberikan pelatihan atau bantuan alat, tetapi yang mampu membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses modal usaha, memperoleh informasi pasar secara transparan, menggunakan teknologi yang sesuai, dan menjalin koneksi dengan jaringan pemasaran yang lebih luas.

Akses terhadap modal dan pembiayaan menjadi faktor paling mendasar, terutama bagi nelayan dan pembudidaya kecil yang umumnya tidak memiliki jaminan formal untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan. Tanpa dukungan pembiayaan yang inklusif dan berbunga rendah, mereka cenderung bergantung pada tengkulak dengan sistem bagi hasil yang merugikan. Sementara itu, akses informasi pasar memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk mengambil keputusan ekonomi yang lebih rasional. Ketimpangan informasi harga dan permintaan selama ini menyebabkan posisi tawar masyarakat pesisir lemah di hadapan perantara. Oleh karena itu, transparansi rantai pasok dan sistem informasi pasar berbasis digital menjadi elemen strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Dari sisi teknologi, ketersediaan inovasi yang tepat guna serta layanan pendampingan teknis berkelanjutan menjadi kunci keberlanjutan program. Teknologi yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kondisi lokal justru berisiko menciptakan ketergantungan baru. Terakhir, akses terhadap jaringan pemasaran menentukan sejauh mana produk masyarakat pesisir dapat menembus pasar bernilai tinggi. Koneksi langsung dengan pembeli besar seperti hotel, restoran, atau eksportir, serta pemanfaatan platform digital, membuka peluang peningkatan pendapatan dan penguatan posisi tawar pelaku usaha kecil. Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir perlu bergeser dari sekadar peningkatan kapasitas menuju penguatan akses struktural terhadap sumber daya kritis. Pemberdayaan sejati terjadi ketika masyarakat tidak hanya mampu berpartisipasi dalam program, tetapi juga memiliki kontrol nyata atas sumber daya yang menentukan masa depan ekonominya.

Melalui proses adaptasi partisipatif, tim pendamping bersama para pembudidaya melakukan berbagai modifikasi terhadap desain dan operasional sistem bioflok agar lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Adaptasi tersebut mencakup substitusi material mahal dengan bahan lokal seperti drum plastik bekas dan sistem aerasi bambu sederhana, penyederhanaan prosedur monitoring, serta lokalisasi input produksi melalui penggunaan probiotik buatan sendiri dan limbah organik lokal sebagai sumber karbon. Pendekatan ini menurunkan hambatan ekonomi dan teknis secara signifikan, sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap teknologi yang digunakan.

Data pada Tabel 10 memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara tingkat akses terhadap sumber daya kritis dan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pesisir. Daerah dengan tingkat akses yang lebih tinggi terhadap pembiayaan, informasi pasar, teknologi, dan jaringan pemasaran cenderung menunjukkan capaian keberhasilan yang lebih baik. Lombok Utara, misalnya, mencatat tingkat keberhasilan program sebesar 82%, jauh lebih tinggi dibandingkan Indramayu yang hanya mencapai 58%. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak akan efektif tanpa dukungan sistemik terhadap akses ekonomi dan kelembagaan. Program yang hanya berfokus pada pelatihan dan distribusi teknologi tanpa menyediakan modal kerja nyata cenderung berhenti pada tahap percontohan. Analisis empiris menunjukkan bahwa program dengan dukungan skema pembiayaan mikro memiliki tingkat keberhasilan hingga 73%, dibandingkan hanya 28% pada program tanpa dukungan akses modal. Hal ini membuktikan bahwa pelatihan dan teknologi hanya dapat berfungsi optimal jika masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk mengoperasikannya.

Kasus Lombok Utara menjadi contoh konkret keberhasilan integrasi antara intervensi teknis dan dukungan akses keuangan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank NTB untuk menyalurkan *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Wisata Bahari* dengan bunga hanya 6% per tahun setengah dari bunga komersial normal. Melalui kebijakan ini, kelompok Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) memperoleh modal usaha untuk membeli perahu wisata dan alat snorkeling tanpa memerlukan agunan formal. Selain itu, mereka juga difasilitasi untuk menjalin kemitraan langsung dengan travel agent dan hotel,

Tabel 10. Hubungan antara Akses terhadap Sumber Daya Kritis dan Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Wilayah	Akses Pembiayaan (%)	Akses Info Pasar (%)	Akses Teknologi (%)	Akses Jaringan (%)	Keberhasilan Program (%)
Lombok Utara	78	85	82	80	82
Pati	52	48	65	42	65
Indramayu	35	28	45	30	58

memotong rantai tengkulak dan meningkatkan margin keuntungan dari 35% menjadi 65%.

“Dulu kami sulit dapat modal untuk beli perahu wisata dan alat snorkeling. Bank konvensional minta agunan yang kami tidak punya. Setelah ada KUR dengan bunga murah dan tanpa agunan ribet, kami bisa mulai usaha. Sekarang sudah punya 8 perahu dan pendapatan naik drastis.” (Anggota Pokdarwis, wawancara 24 September 2023)

Sebaliknya, Indramayu menunjukkan kondisi struktural yang berlawanan. Ketiadaan akses terhadap lembaga keuangan formal membuat nelayan terjebak dalam siklus eksploitasi rentenir dan tengkulak. Dengan bunga pinjaman mencapai 10–15% per bulan, mereka dipaksa menjual hasil tangkapan dengan harga 30–40% di bawah harga pasar. Akibatnya, kesejahteraan nelayan stagnan dan kemiskinan menjadi sistemik.

“Masalah utama kami bukan nggak bisa melaut, tapi nggak punya modal untuk beli solar dan perbaiki jaring. Kalau ada modal bergulir dengan bunga rendah dan pasar yang pasti, kami pasti bisa berkembang. Tapi kenyataannya, kami terus terjerat hutang ke tengkulak.” (Nelayan Indramayu, wawancara 16 Agustus 2023)

Secara kebijakan, temuan ini memperkuat argumen bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir harus bersifat holistik dan inklusif. Intervensi teknis seperti pelatihan, transfer teknologi, atau pendampingan harus diintegrasikan dengan mekanisme yang menjamin akses terhadap pembiayaan murah, informasi pasar yang transparan, dan jaringan pemasaran yang adil. Dengan cara ini, program pemberdayaan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat posisi tawar ekonomi masyarakat dalam rantai nilai sektor kelautan dan perikanan.

Dukungan Kebijakan Pemerintah

Dukungan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berperan krusial dalam menciptakan *enabling environment* bagi keberhasilan dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir. Kebijakan yang konsisten, progresif, dan partisipatif menjadi faktor pengungkit utama dalam memastikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis program. Dalam konteks ini, dimensi dukungan kebijakan dapat dilihat dari empat aspek utama: (1) regulasi dan kerangka hukum yang melindungi hak masyarakat dan sumber daya pesisir, (2) alokasi anggaran yang stabil dan berbasis kinerja, (3) koordinasi lintas-sektor dan lintas-level pemerintahan, serta (4) sistem insentif dan disinsentif yang mendorong praktik ramah lingkungan.

Untuk memahami sejauh mana faktor-faktor tersebut diimplementasikan di berbagai wilayah, dilakukan analisis komparatif terhadap tiga lokasi studi: Lombok Utara, Pati, dan Indramayu. Ketiganya merepresentasikan variasi tingkat komitmen dan konsistensi kebijakan daerah dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan. Lombok Utara menampilkan model kebijakan progresif dengan dukungan regulasi dan fiskal yang kuat, sedangkan Pati dan Indramayu menunjukkan kelemahan dalam aspek kelembagaan dan kesinambungan kebijakan.

Perbandingan antarwilayah ini tersaji dalam Tabel 11, yang menggambarkan perbedaan tingkat dukungan kebijakan daerah terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pesisir berdasarkan indikator utama seperti keberadaan peraturan daerah, alokasi APBD, konsistensi kebijakan, program insentif fiskal, koordinasi lintas-sektor, dan efektivitas program.

Tabel 11 memperlihatkan disparitas yang signifikan dalam dukungan kebijakan daerah terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pesisir di tiga kabupaten. Lombok Utara menunjukkan model kebijakan yang progresif

Tabel 11. Perbandingan Dukungan Kebijakan Daerah terhadap Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Indikator	Lombok Utara	Pati	Indramayu
Perda Khusus Pesisir	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Alokasi APBD (%)	4,5%	2,1%	1,8%
Konsistensi Kebijakan (skor)	8,5/10	5,2/10	4,8/10
Program Insentif Fiskal	Ada	Terbatas	Tidak Ada
Koordinasi Lintas-Sektor	Kuat	Moderate	Lemah
Efektivitas Program (%)	82%	65%	58%

dengan dukungan regulatif dan fiskal yang kuat, tercermin dari keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Khusus Pesisir, alokasi APBD sebesar 4,5%, serta koordinasi lintas-sektor yang kuat. Kombinasi ini berkontribusi pada tingkat efektivitas program tertinggi, yaitu 82%, serta konsistensi kebijakan yang mencapai 8,5 dari 10. Sebaliknya, Pati dan Indramayu menggambarkan kondisi kelembagaan yang lebih lemah. Ketidaaan Perda spesifik dan rendahnya alokasi anggaran (masing-masing 2,1% dan 1,8%) menunjukkan bahwa sektor kelautan dan pesisir belum menjadi prioritas kebijakan daerah. Koordinasi lintas-sektor yang bersifat moderat hingga lemah, serta absennya insentif fiskal yang memadai, menyebabkan efektivitas program menurun menjadi 65% di Pati dan hanya 58% di Indramayu. Konsistensi kebijakan juga menjadi isu krusial, terutama di wilayah dengan tingkat volatilitas politik tinggi, di mana pergantian kepala daerah kerap mengubah arah program. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada kapasitas teknis atau partisipasi komunitas, tetapi juga pada stabilitas dan keberpihakan kebijakan publik.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Hasil kajian ini menegaskan bahwa efektivitas program pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas proses pemberdayaan masyarakat dan kedalamannya partisipasi yang terbangun di tingkat lokal. Analisis terhadap tiga kabupaten, yaitu Indramayu, Pati, dan Lombok Utara menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, semakin besar pula dampak keberhasilan dan keberlanjutan program. Model pemberdayaan partisipatif terbukti menghasilkan efektivitas tertinggi dengan capaian hingga 82 persen, jauh melampaui model paternalistik yang hanya mencapai 35 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berbasis pada kemitraan sejarah dan kontrol warga tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, tetapi juga memperkuat daya tahan sosial-ekonomi masyarakat setelah intervensi pemerintah berakhir.

Partisipasi masyarakat berperan sebagai variabel kunci yang memediasi hubungan antara pemberdayaan dan efektivitas program ($\beta = 0,35$; $p < 0,01$). Partisipasi yang bermakna tidak hanya mempercepat pencapaian target pembangunan, tetapi juga mendorong munculnya inovasi lokal serta memperpanjang umur keberlanjutan kegiatan pasca-program. Dari hasil penelitian, empat faktor utama

terbukti paling menentukan keberhasilan program, yaitu: pertama, kapasitas kelembagaan masyarakat yang kokoh dan akuntabel sebagai fondasi tata kelola kolaboratif; kedua, kesesuaian teknologi dengan konteks lokal yang menjamin adopsi dan keberlanjutan inovasi; ketiga, akses yang setara terhadap sumber daya seperti modal, informasi, dan pasar yang memperkuat kemandirian ekonomi; serta keempat, dukungan kebijakan pemerintah daerah yang konsisten melalui regulasi partisipatif, pendampingan, dan sistem insentif yang berpihak pada masyarakat pesisir. Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa pendekatan pembangunan yang bersifat top-down justru menimbulkan ketergantungan, melemahkan inisiatif lokal, dan membatasi keberlanjutan, sementara pendekatan bottom-up yang partisipatif mampu menciptakan rasa kepemilikan, solidaritas, dan inovasi yang lebih kuat di tingkat komunitas. Kasus Lombok Utara menjadi representasi keberhasilan tata kelola kolaboratif di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator, bukan pengendali utama, sementara masyarakat tampil sebagai aktor otonom dalam merancang, melaksanakan, dan menjaga keberlanjutan program. Secara keseluruhan, hasil kajian ini menegaskan bahwa efektivitas dan keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, teknologi, atau anggaran, melainkan pada kualitas proses sosial, kekuatan kelembagaan lokal, dan arah kebijakan publik yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai subjek utama pembangunan.

Untuk memperkuat efektivitas dan keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan, arah kebijakan ke depan menuntut reorientasi paradigma, kelembagaan, dan tata kelola pesisir secara menyeluruh. Transformasi ini berangkat dari kebutuhan untuk menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama pembangunan, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator, pengarah kebijakan, dan penjamin keberlanjutan. Paradigma pembangunan harus beralih dari pendekatan *top-down* berbasis proyek menuju tata kelola partisipatif (*bottom-up participatory governance*). Dalam model ini, masyarakat berperan sebagai pengambil keputusan utama di seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu memastikan keberlanjutan sistem dengan menyediakan kerangka regulasi nasional yang adaptif serta mekanisme pendanaan berbasis insentif partisipatif, sementara pemerintah daerah bertugas menginstitusionalisasikan ruang partisipasi publik melalui forum musyawarah pesisir

dan mekanisme perencanaan berbasis komunitas.

Efektivitas partisipasi masyarakat sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan lokal. Karena itu, penguatan kelembagaan seperti koperasi nelayan, kelompok pengolah, dan Pokdarwis harus menjadi prioritas melalui fasilitasi legalitas formal, akses pembiayaan, serta penerapan mekanisme akuntabilitas sosial seperti audit komunitas, laporan publik tahunan, dan forum pertanggungjawaban terbuka. Proses ini perlu disertai pengembangan kapasitas kepemimpinan lokal, manajemen organisasi, dan literasi digital, dengan dukungan berkelanjutan dari lembaga pelatihan pemerintah, universitas, dan mitra pendamping masyarakat. Kebijakan inovasi teknologi perlu diarahkan pada *co-creation system*, yaitu suatu pendekatan kolaboratif antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah untuk menghasilkan teknologi tepat guna yang kontekstual dan berkelanjutan. Inovasi tidak semata transfer teknologi dari luar, melainkan hasil dialog pengetahuan antara sains modern dan kearifan lokal. Dalam sistem ini, peran penyuluh dan pendamping lapangan bergeser dari sekadar instruktur menjadi fasilitator inovasi lokal, memastikan relevansi, kesederhanaan, dan keberlanjutan teknologi yang diadopsi.

Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya dan pasar harus menjadi fokus kebijakan ekonomi pesisir. Pemerintah pusat perlu memperluas skema pembiayaan inklusif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan dengan bunga rendah dan prosedur yang adaptif terhadap karakter usaha mikro pesisir. Pemerintah daerah bersama sektor swasta dapat berperan sebagai penghubung rantai nilai (value chain connector), memperkuat kemitraan antara kelompok masyarakat dengan pelaku usaha seperti hotel, restoran, dan eksportir. Di tingkat lokal, penguatan koperasi nelayan dan lembaga keuangan mikro menjadi instrumen penting untuk distribusi modal yang fleksibel. Selain itu, pengembangan sistem informasi pasar digital di bawah koordinasi dinas perikanan dan BUMDes dapat memperpendek rantai distribusi, meningkatkan transparansi harga, dan memperkuat posisi tawar masyarakat. Untuk menjamin konsistensi implementasi, dibutuhkan penguatan kebijakan dan sistem insentif daerah agar pemberdayaan masyarakat menjadi bagian integral dari tata kelola pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagai dasar hukum pengakuan hak masyarakat dalam proses pembangunan. Indikator partisipasi dan pemberdayaan perlu diintegrasikan

ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga kinerja daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas tata kelola partisipatif. Dari sisi pembiayaan, daerah perlu mengalokasikan minimal 4–5% APBD sektor kelautan dan perikanan bagi program berbasis masyarakat yang terbukti menghasilkan nilai sosial dan ekonomi berganda.

Melalui pembagian peran yang sinergis, maka pemerintah pusat sebagai regulator dan penyedia kebijakan makro, pemerintah daerah sebagai pelaksana dan fasilitator, lembaga riset dan perguruan tinggi sebagai sumber inovasi, sektor swasta sebagai mitra ekonomi, serta masyarakat sebagai subjek utama pembangunan—tata kelola kelautan dan perikanan dapat bertransformasi menuju sistem yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial. Rekomendasi ini menuntut tidak hanya perubahan teknis, tetapi juga reformasi institusional dan budaya birokrasi, menuju model pembangunan pesisir yang berbasis kemandirian masyarakat dan keberlanjutan ekologi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini, termasuk instansi pemerintah, pemangku kepentingan, para ahli, serta masyarakat pesisir dan informan lapangan yang telah berbagi data, informasi, dan pengalaman mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Masukan substantif, diskusi, serta saran dari berbagai pihak tersebut sangat membantu dalam memperkaya analisis dan menyempurnakan kajian ini, sementara segala kekurangan yang masih terdapat dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa kontributor utama penulis adalah Wahjudi Poerwanto dan penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (2019). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.

- Bappenas. (2023). *Laporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2023*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Chambers, R. (2019). Participatory rural appraisal: Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253-1268.
- Chuenpagdee, R., & Jentoft, S. (2018). *Transforming the governance of small-scale fisheries*. *Maritime Studies*, 17(2), 101-115. <https://doi.org/10.1007/s40152-018-0082-3>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Freire, P. (2018). *Pedagogy of the Oppressed*: 50th Anniversary Edition. New York: Bloomsbury Academic.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Laporan Tabungan Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan 2023*. Jakarta: KKP.
- Kusnadi. (2020). Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. Yogyakarta: LKiS.
- Kusnadi. (2020). *Sosiologi pesisir: Masyarakat nelayan dan dinamika sosial ekonomi pesisir*. Yogyakarta: LKiS.
- Nikijuluw, V. P. H. (2022). Blue economy dan masa depan ekonomi Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Nikijuluw, V. P. H. (2022). *Pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan di Indonesia: Tantangan dan peluang*. Jakarta: IPB Press.
- Ostrom, E. (2020). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Permana, R., & Dharmawan, A. H. (2020). Efektivitas program pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia: Studi kasus Kabupaten Indramayu. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(2), 145-160.
- Pomeroy, R., Arango, C., Lomboy, C. G., & Box, S. (2021). Financial inclusion to build economic resilience in small-scale fisheries. *Marine Policy*, 118, 103982.
- Rahardjo, S., Satria, A., & Kinseng, R. A. (2019). Strategi penguatan kelembagaan ekonomi nelayan dalam menghadapi perubahan iklim. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(1), 45-58.
- Satria, A. (2021). *Pengelolaan sumber daya perikanan: Perspektif sosial-ekologi*. Bogor: IPB Press.
- Satria, A. (2021). Politik Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sen, A. (2019). *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Sulistiyanto, Y., Atmadja, W. R., & Nugroho, B. (2020). Participatory approach in coastal community development: Lessons from Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 196, 105292.
- White, S. C. (2018). Depoliticising development: The uses and abuses of participation. *Development in Practice*, 6(1), 6-15.
- World Bank. (2023). *Indonesia Blue Economy Development Strategy*. Washington DC: World Bank Group.
- Yulianto, G., Purnomo, A. H., & Sari, Y. D. (2021). Community-based fisheries management in Indonesia: Challenges and opportunities. *Marine Policy*, 132, 104693.
- Zulbainarni, N., Anna, Z., & Yonvitner. (2020). Blue economy implementation in Indonesia: A preliminary study. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 423(1), 012050.